



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS
KETENAGAKERJAAN, DJSN, DAN BNP2TKI)**

- Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : III
Jenis rapat : Rapat Kerja
Rapat ke :
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Menteri Kesehatan RI;
Hari/Tanggal : Senin, 27 Januari 2014
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai
Acara : 1. Penjelasan dan laporan tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian Kesehatan RI, termasuk diantaranya:
a. Hambatan dan kendala yang dihadapi;
b. Skema insentif bagi tenaga kesehatan;
c. Perkembangan kerjasama dengan PPK tingkat I khususnya dokter keluarga dan klinik;
d. Kepesertaan dan strategi peningkatan kepesertaan;
e. Laporan integrasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ke BPJS Kesehatan; dan
f. Sosialisasi peraturan pelaksana UU tentang BPJS.
2. Penjelasan mengenai pembayaran tagihan atas klaim Jamkesmas Tahun 2013;
3. Penjelasan capaian kinerja atas program/kegiatan prioritas Tahun 2013, khususnya:
a. Pelaksanaan program Jamkesmas;
b. Pelaksanaan program Jampersal;
c. Pelaksanaan program BOK;
d. Capaian target MDGs.
4. Pembahasan dan penjelasan mengenai

Kebijakan Rencana Program (KRP) prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014;

5. Penjelasan Kementerian Kesehatan RI tentang Tunjangan Kinerja di RS/UPT vertikal BLU.

Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : A. orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 11.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Merespon berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama dengan Tim Sosialisasi BPJS dan pemerintahan daerah, mengintensifkan sosialisasi baik program atau kebijakan melalui berbagai media dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
 - b. Segera mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan teknis yang muncul dalam pelaksanaan SJSN Kesehatan.
 - c. Segera menyelesaikan Formularium Nasional untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan e-katalog obat tahun 2014.
 - d. berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengevaluasi kepesertaan PBI sehingga seluruh orang miskin dan tidak mampu menjadi peserta PBI.
 - e. Mengevaluasi kembali premi non PBI.
 - f. Segera menyelesaikan evaluasi INA CBGs sebagai implikasi tarif INA CBGs yang belum mengakomodir *real cost* rumah sakit.

- g. Mendorong BPJS Kesehatan untuk menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan terkait peningkatan peserta BPJS Kesehatan.
 - h. membentuk tim monitoring dan evaluasi lintas kementerian dan lintas sektoral.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk terus mendorong pemerintah daerah agar mulai mempersiapkan integrasi program Jamkesda ke BPJS Kesehatan.
 3. Komisi IX DPR RI mendukung anggaran sebesar Rp400 Milyar untuk membiayai kepesertaan penghuni panti, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, untuk diajukan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2014.
 4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera menuntaskan tagihan atas klaim Jamkesmas Tahun 2013.
 5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan upaya-upaya strategis guna percepatan pencapaian target MDGs khususnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).
 6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI menyelesaikan permasalahan terkait tunjangan kinerja PNS di 11 (sebelas) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
 7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)-Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI guna menyelesaikan permasalahan Bidan PTT yang telah menyelesaikan masa baktinya.
 8. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan pendalaman/konsinyir untuk membahas penambahan anggaran peserta PBI dan pembayaran klaim Jamkesmas tahun 2013 sebagai tindak lanjut hasil RDP tanggal 16 Desember 2013.

Rapat diakhiri pukul 17.15 WIB.

KETUA RAPAT,



dr. RIBKA TJIPTANING